

**PENGGORGANISASIAN DISEMINASI INFORMASI MELALUI *WEBSITE*
GUNA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI PROVINSI LAMPUNG**

Yolandasari
NPP. 29.0582

*Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

E-mail: yolandasari16.ys@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the problem of ambiguity of information circulating in society and the rapid dissemination of information that has not been proven to be true. Purpose:* This study aims to determine the success of organizing information dissemination in the Department of Communication, Information and Statistics of Lampung Province. **Methods:** This study uses qualitative research through interview, observation and documentation techniques using Karl Weicks's organizational information theory, then analysed by descriptive analysis techniques consisting of data reduction, presentation, conclusions and data verification. **Result:** The results show that the focus of the research has been running effectively. It is evident from the determination of information that has been successfully carried out, well-organized selection of information, and optimal retention in dissemination. **Conclusion:** Organizing information dissemination through the website is effective in realizing public information disclosure in Lampung Province, this is because the determination of information in dissemination is effective in unraveling ambiguity for the equitable distribution of quality public information. Selection of information in organizing dissemination by providing quality information so that taboo and unproven information can be monitored and supervised by paying attention to information criteria. Retention in information by evaluating the dissemination that has been carried out which shows public satisfaction with information services.

Keywords: *Dissemination; Organizing; Public Information Disclosure; Website*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan ambiguitas informasi yang beredar di masyarakat dan cepatnya diseminasi informasi yang belum terbukti kebenarannya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan pengorganisasian diseminasi informasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik wawancara, observasi dan

dokumentasi dengan menggunakan teori informasi organisasi Karl Weick, selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fokus penelitian telah berjalan dengan efektif. Terbukti dari penentuan informasi yang telah berhasil dilakukan, seleksi informasi yang terorganisasi dengan baik, dan retensi dalam diseminasi telah optimal. **Kesimpulan:** Pengorganisasian diseminasi informasi melalui *website* efektif dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung, hal ini dikarenakan penentuan informasi dalam diseminasi efektif mengurai ambiguitas untuk pemerataan informasi publik yang berkualitas. Seleksi informasi dalam pengorganisasian diseminasi dengan menyediakan informasi yang berkualitas agar informasi yang tabu dan belum terbukti kebenarannya dapat terpantau dan terawasi dengan memperhatikan kriteria informasi. Retensi dalam informasi dengan mengevaluasi diseminasi yang telah dilakukan yang menunjukkan kepuasan masyarakat akan pelayanan informasi.

Kata kunci: Diseminasi; Keterbukaan Informasi Publik; Pengorganisasian; Website

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* merubah tatanan kehidupan yang awalnya dominan tatap muka (*offline*) menjadi dalam jaringan (*online*). Perubahan ini pun memicu perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menuju arah digitalisasi yang didukung dengan terus meningkatnya jumlah pengguna internet setiap tahunnya. Perkembangan TIK ini memacu pendayagunaan teknologi oleh pemerintah menuju transformasi digital penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang disampaikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.¹

SPBE ini menimbulkan terciptanya pembenahan tata kelola pemerintahan (*good governance*), yakni penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Pemerintah menyediakan transparansi atau keterbukaan dalam penyampaian informasi publik melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) sebagai badan publik yang bertugas penyelenggaraan Bidang Kominfo dalam urusan pemerintahan.² Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini merupakan perwujudan masyarakat berbudaya informasi dengan meningkatkan kualitas layanan dan daya dukung infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi.³

¹ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" (2018): 110.

² Peraturan Presiden, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika* (Jakarta, 2015).

³ Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, "Diskominfo Provinsi Lampung," accessed September 3, 2021, <https://diskominfo.lampungprov.go.id/>.

Mewujudkan KIP memerlukan perencanaan yang matang dan visioner, disebarkan secara terencana, terarah dan terkelola melalui proses diseminasi dengan disiapkannya kelengkapan pelayanan informasi sesuai hak dan kebutuhan informasi masyarakat.⁴ Derasnya arus informasi yang ada di masyarakat perlu dilakukan pengorganisasian agar menghasilkan konten-konten informasi yang berkualitas. Pemerintah menggunakan kanal *website* sebagai media penyampaian informasi kegiatan pemerintah yang menjadikan komunikasi, informasi dilakukan via internet. Ketersediaan *website* ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam diseminasi informasi dengan membiarkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Pemanfaatan *website* dalam diseminasi tidak terlepas dari mengelola *website* yang ada. Salah satunya dengan pengorganisasian yang tidak hanya mengenai pengaturan ataupun penempatan SDM namun juga berkaitan dengan pengaturan informasi yang ada di masyarakat. Informasi-informasi yang ada dipilah terlebih dahulu, diverifikasi kebenarannya kemudian diseleksi informasi yang boleh disebarluaskan dan yang hanya menjadi konsumsi lembaga ataupun badan publik. Pengorganisasian menjadi penting untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran berita bohong (*hoax*) sehingga informasi yang disediakan pemerintah merupakan informasi yang akurat dan akuntabel.

Pemanfaatan *website* dalam diseminasi informasi membutuhkan beberapa faktor pendukung dalam penerapannya diantaranya koordinasi kerja, sarana prasarana kerja, jaringan internet, dan lain sebagainya. Faktor pendukung tersebut membantu pemerintah dalam mendiseminasikan informasi untuk mewujudkan KIP, sehingga penulis tertarik mengangkat topik riset mengenai “Pengorganisasian Diseminasi Informasi Melalui *Website* Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pengorganisasian diseminasi informasi melalui *website* guna mewujudkan KIP di Provinsi Lampung. Pengorganisasian diseminasi melalui *website* di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) terkait evaluasi *Google Pagespeed* terhadap kinerja web Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang berada di urutan kelima dengan nilai 84 untuk aplikasi seluler dan 97 untuk *desktop*. Hasil evaluasi ini menunjukkan kinerja web Pemprov Lampung berada di bawah web Pemprov DKI Jakarta yang memperoleh nilai 92 untuk seluler dan 99 untuk *desktop*, Sumatera Selatan dengan nilai 90 untuk seluler dan 92 untuk *desktop*, disusul Sumatera Barat dengan nilai 89 untuk seluler dan 91 untuk *desktop*, dan Bengkulu memperoleh nilai 88 aplikasi seluler dan 90 aplikasi *desktop*.⁵

Dalam globalisasi informasi, Provinsi Lampung menempati posisi ketiga peringkat pengguna internet terbesar di Pulau Sumatera Tahun 2020 dengan jumlah

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, 2008.

⁵ “Hasil Evaluasi Google Pagespeed Terhadap Kinerja Web Pemerintah,” accessed September 20, 2021, <https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/>.

pengguna 5,2 juta jiwa dan Sumatera Barat di urutan keempat sebanyak 5 juta pengguna internet.⁶ Hal ini menunjukkan penetrasi internet mengalami peningkatan. Provinsi Lampung juga menempati posisi ketiga kategori pemda terinovatif dalam penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) kategori kanal digital sub kategori *website* dengan 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung memperoleh penghargaan pemda sangat inovatif dan terinovatif.⁷

Indeks literasi digital Provinsi Lampung berada di angka 3,52 dalam kategori sedang, diatas rata-rata nasional.⁸ Indeks literasi digital Provinsi Lampung lebih tinggi dibanding Provinsi Banten dengan skor 3,37 dan Provinsi Sumatera Selatan dengan skor indeks 3,44. Hal ini menunjang diseminasi informasi melalui *website* yang terus digiatkan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Masih adanya kendala penerimaan sinyal internet telepon seluler di desa/kelurahan menghambat proses diseminasi. Terdapat 749 desa di Provinsi Lampung yang mengalami kendala jaringan internet, 431 desa belum terjangkau sinyal telepon genggam.⁹ *Blank spot* ini mempengaruhi penerimaan informasi pada masyarakat yang berusaha diatasi dengan mengorganisasikan informasi yang ada dan membangun jaringan telekomunikasi yang memadai.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks diseminasi informasi melalui *website* sebagai media penyebaran informasi publik dalam mewujudkan *good governance*. Riset sebelumnya mengenai strategi diseminasi yang dilakukan dinas komunikasi dan informatika dalam mewujudkan *good governance*, meneliti strategi yang dilakukan pemerintah dengan berkerjasama merangkul media cetak dan media *online* serta menyebarkan informasi dalam bentuk *videotron* dan mengembangkan program yang menarik partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari metode diseminasi informasi

⁶ suara.com, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2020 Melejit, Sumut Tertinggi Di Sumatra," *Suarasumut.Id*, last modified November 12, 2020, accessed November 4, 2021, <https://sumut.suara.com/read/2020/11/12/222254/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2020-melejit-sumut-tertinggi-di-sumatra#:~:text=Di urutan kedua ada Sumatra Selatan dengan jumlah,bahwa pengguna internet paling besar terkonsentrasi di Jawa.>

⁷ Tantri Lestari, "Daftar Pemda Peraih Innovative Government Award 2020," last modified 2020, accessed November 15, 2021, <https://www.tagar.id/daftar-pemda-peraih-innovative-government-award-2020>.

⁸ "Indeks Literasi Digital Indonesia," <http://survei.literasidigital.id/dashboard-literasi-digital>.

⁹ Badan Pusat Statistik Lampung, *Provinsi Lampung Dalam Angka 2021*, BPS Provinsi Lampung, vol. 2, 2021.

dengan menyediakan *videotron* dan penyampaian informasi melalui *infografis* dan *videografis*.¹⁰¹¹¹²¹³

Riset selanjutnya mengenai optimalisasi penggunaan *website* sebagai media penyebaran informasi publik menyatakan bahwa dengan melakukan optimalisasi layanan komunikasi publik pada lembaga pemerintah dengan mengoptimalkan *website*, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur komunikasi dapat membuktikan pemanfaatan *website* membuat kualitas layanan informasi mengalami peningkatan.¹⁴¹⁵¹⁶¹⁷ Riset berikutnya mengenai kualitas *website* pemerintah daerah menjelaskan bahwa peningkatan kualitas *website* akan berpengaruh pada efektivitas pelayanan informasi yang berasal dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan *website*. Pengelolaan *website* membuat layanan informasi terkendali dan sesuai standar.¹⁸¹⁹ Riset terdahulu mengenai efektivitas pelayanan informasi melalui *website* membahas pelaksanaan *e-Government*

¹⁰ Risda. Wulandari, “Strategi Diseminasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Kec. Malili Kab. Luwu Timur” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

¹¹ Syaifullah, “Strategi Diseminasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Penerapan Transparansi Informasi Di Kota Palopo” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019).

¹² Nova Yulinda, “Strategi Public Relations Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Good Governance” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

¹³ Alan Aldo Powa, Johannis E. Kaawoan, and Fanley N. Pangemanan, “Pemanfaatan Teknologi Dan Informasi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian Di Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–12.

¹⁴ Centurion Chandratama Priyatna et al., “Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik,” *Jurnal Kajian Komunikasi* 8, no. 1 (2020): 114.

¹⁵ Dewi Ayu Sri Hastuti and Eny Susilowati, “Cyber Public Relations Diskominfo Kabupaten Klaten Dalam Optimalisasi Layanan Informasi Publik,” *Academic Journal of Da’wa and Communication* 01, no. 01 (2020): 41–57.

¹⁶ Farniwati Fattah, “Pemanfaatan Website Sebagai Media Penyebaran Informasi Pada Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar,” *Ilmu Komputer Untuk Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 16–21, <https://ilkomas.id/index.php/ilkomas/article/view/5>.

¹⁷ Ika Nurlaili Isnainiyah and In Ernawati, “Optimalisasi Penggunaan Website Kabupaten Pandeglang Untuk Penyebaran Informasi Publik,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ* 4, no. 2 (2021): 141–150.

¹⁸ Yurisdicte C. Kharisma, “Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah” 6, no. 3 (2018): 1087–1104.

¹⁹ Novika Danayanti, “Pengukuran Tingkat Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Kualitas Website Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

menggunakan *website* dengan *website content* yang efektif dalam penyelenggaraan pelayanan.²⁰²¹²²

Riset terdahulu menjadi acuan ketertarikan penulis untuk membahas topik penulis di atas. Dari riset sebelumnya, penulis tidak menemukan judul riset yang sama seperti judul riset penulis.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan riset yang berbeda dan belum dilakukan oleh riset terdahulu, dimana konteks riset yang dilakukan lebih terfokus kepada pengorganisasian informasi dalam diseminasi melalui *website* guna mewujudkan KIP di Provinsi Lampung, dengan menggunakan dimensi dan tolak ukur penilaian yang berbeda dari riset terdahulu yakni pengorganisasian ditinjau dari teori informasi organisasi Karl Weick dengan beberapa indikator yakni penentuan, seleksi, dan retensi dalam diseminasi informasi.²³

1.5 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengorganisasian diseminasi informasi melalui *website* oleh Diskominfo guna mewujudkan KIP di Provinsi Lampung, Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang pengorganisasian diseminasi informasi melalui *website* dalam KIP di Provinsi Lampung.

II. METODE

Metode di dalam riset penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang berada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti pada fokus riset yang mengarah pada pengorganisasian diseminasi informasi publik melalui *website*, dengan memperhatikan komponen penting pengorganisasian diseminasi dengan menggunakan teori informasi organisasi Karl Weick yang terdiri dari penentuan, seleksi dan retensi guna mewujudkan KIP. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk menyampaikan dan memberikan informasi bagaimana gambaran pengorganisasian diseminasi informasi di 13 kabupaten dan 2 (dua) kota yang ada di Provinsi Lampung melalui *website* disertai fakta-fakta dan data yang saling berkaitan. Pendekatan induktif digunakan yakni pendekatan yang awalnya bersifat umum atau luas kemudian mengarah pada sifat yang khusus, dari elemen yang luas

²⁰ Nida Handayani, "Efektivitas Website Dalam Pelayanan Elektronik Pemerintah Kota Depok," *Jurnal Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat* 15, no. 1 (2017): 46--57.

²¹ Ramadhan Aunur Rahman, Iman Surya, and Daud Kondorura, "Efektivitas Pelayanan Infomasi Melalui Website Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda," *Pemerintahan Integratif* 8, no. 1 (2020): 701--711.

²² Stevani A.P Polii, "Efektivitas Informasi Pelayanan Perizinan Melalui Website Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-Ptsp) Kota Manado," *Jurnal Politico* 10, no. 4 (2021).

²³ Richard West and Lynn H. Tunner, *Pengantar Teori Komunikasi*, 3rd ed. (Jakarta: Salemba Humanika, 2008).

akan lebih mengecil atau lebih spesifik, termasuk mencari cara penyelesaian masalah yang kompleks dengan mengembangkan data atau teknik dalam pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer mencakup metode observasi dan wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk bukti, catatan atau foto dokumentasi yang didapatkan selama penelitian. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk dapat menganalisis masalah yang didapatkan dalam penelitian pengorganisasian diseminasi informasi di Provinsi Lampung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan *website* dalam diseminasi informasi oleh Diskominfo Provinsi Lampung merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur di atas menjadi dasar pedoman pengorganisasian diseminasi informasi melalui *website* yang ada di Provinsi Lampung. Tujuan pengorganisasian diseminasi ini sebagai bentuk upaya pemerintah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan akuntabel secara lebih baik. Pengorganisasian diseminasi informasi oleh Diskominfo melalui *website* merupakan wujud penyediaan fasilitas telematika untuk menciptakan masyarakat informasi yang memberikan ruang gerak lebih luas dalam partisipasi aktif dalam proses pemerintahan.

3.1 Penentuan Pengorganisasian Dalam Diseminasi Informasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Penentuan informasi dalam diseminasi melalui *website* di Provinsi Lampung mengatur informasi yang ada di masyarakat untuk membentuk masyarakat yang berpengetahuan. Penentuan dalam pengorganisasian yang diatur oleh pemerintah terdiri atas beberapa kegiatan yakni dengan melihat keragaman dan integrasi informasi yang terdapat di *website*.

Pembentukan masyarakat informatif di tengah keragaman informasi melalui penyebaran informasi secara aktif oleh pemerintah dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat disertai kemudahan akses.



Gambar 3. 1
Profil Website

Gambar di atas menunjukkan profil *website* Provinsi Lampung yang memuat *data center* dokumen penatalaksanaan dan pengawasan *e-government*, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta pusat data penghubung layanan pemerintah.



Gambar 3. 2
Link Media Sosial

Gambar di atas memuat *link* media sosial Pemprov Lampung yang dapat dikunjungi untuk mengetahui informasi terkait kondisi pemerintahan. Hasil wawancara yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa keragaman informasi terkait kondisi pemerintahan tersedia dalam *website* yang terhubung pada *linktree* media sosial *instagram*, *facebook*, *twitter*, *youtube*, dan *tiktok* dengan nama akun @pemprov.lampung. *Whatsapp* (*call center*) dapat dihubungi di nomor 0811-7905-

000 oleh masyarakat untuk penyampaian permohonan informasi ataupun pengaduan keluhan dan masukan kepada pemerintah.

Pada tahun 2020, media sosial *twitter* dan *tiktok* belum secara aktif digunakan sebagai sarana diseminasi. Pemerintah melakukan diseminasi melalui *instagram*, *facebook* dan *website*. Kegiatan diseminasi informasi dilakukan setiap hari dengan minimal 1 (satu) unggahan per hari. Unggahan di *instagram* dan *facebook* sejumlah 2.222, sedangkan untuk *website* berjumlah 277 unggahan dan *youtube* sebanyak 24 unggahan.

Tabel 3. 1
Diseminasi Informasi Kepada Masyarakat Tahun 2021

Bulan	Instagram	Facebook	Twitter	Tiktok	Youtube	Website
Januari	146	146	-	-	-	17
Februari	155	155	-	-	3	25
Maret	177	177	-	-	1	28
April	202	202	-	-	8	36
Mei	189	189	-	-	1	47
Juni	223	223	-	-	-	67
Juli	197	197	-	-	-	96
Agustus	185	185	66	4	4	88
September	150	150	76	3	-	65
Oktober	192	192	118	-	5	120
November	160	160	197	-	4	99
Desember	135	135	87	4	6	102
Total	2.111	2.111	544	11	32	790

Sumber: Data olahan penulis, 2022

Tabel di atas menunjukkan jumlah berita yang termuat dalam *website* *lampungprov.go.id* sepanjang tahun 2021. Unggahan dalam akun *instagram* dan *facebook* sebanyak 2.111, *youtube* 32 unggahan, dan *website* sebanyak 790 unggahan. Media sosial *twitter* dan *tiktok* telah secara aktif digunakan sebagai sarana diseminasi sejak bulan Agustus. Unggahan pada *twitter* sebanyak 544 dan *tiktok* sejumlah 11 video.

Data unggahan berita Kabupaten/Kota pada Tahun 2020. Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten yang secara aktif mendiseminasikan informasi dalam *website*, yakni sejumlah 1.235 unggahan disusul Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 632 unggahan dan Kabupaten Pringsewu sebanyak 620 unggahan. Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat dan Tanggamus belum aktif meng-*upload* informasi terkait daerahnya pada *website* yang telah disediakan.

Tabel 3. 2
Diseminasi Informasi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Lampung Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Tanggamus	-	-	-	-	-	-	11	24	28	26	27	38	154
Lampung Selatan	31	40	72	31	22	59	46	60	117	115	132	87	812
Lampung Timur	10	8	25	17	15	8	9	18	12	25	15	18	180
Lampung Tengah	9	10	53	42	40	64	39	43	47	45	57	4	453
Lampung Utara	13	19	10	14	15	8	19	6	8	8	15	12	147
Way Kanan	3	-	1	1	-	3	2	-	4	2	1	2	19
Tulang Bawang	37	7	21	8	5	7	4	6	2	20	19	5	141
Pesawaran	-	-	6	2	1	5	7	19	15	10	25	6	96
Pringsewu	58	52	58	72	59	48	28	51	49	44	33	47	599
Mesuji	1	1	17	14	9	7	3	7	9	3	1	-	72
Tulang Bawang Barat	-	-	-	1	4	-	4	1	11	7	22	28	73
Pesisir Barat	19	27	30	60	37	46	38	44	55	39	33	33	461
Bandar Lampung	25	26	38	24	17	32	2	25	15	47	55	48	354
Metro	12	13	39	38	24	36	37	108	43	65	113	103	631
Total	218	203	370	324	248	323	249	412	415	456	548	433	4.194

Sumber: Data olahan penulis, 2022

Tabel di atas memuat data informasi tahun 2021 yakni sebanyak 4.194 unggahan. Kabupaten Lampung Selatan aktif mengunggah informasi sepanjang tahun sejumlah 812 unggahan. Kota Metro mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yakni sebanyak 631 berita diunggah dalam *website*. Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat dan Tanggamus telah mulai aktif mengunggah informasi ke dalam *website* dengan Kabupaten Way Kanan 19 unggahan, Tulang Bawang Barat 73 unggahan, Lampung Barat 2 (dua) unggahan, dan Tanggamus sebanyak 154 unggahan.

Informasi terintegrasi dengan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemprov Lampung melalui *website online* yang *up to date* secara terkoordinasi sehingga domain masing-masing Perangkat Daerah berada di bawah domain www.lampungprov.go.id yang menjamin terlaksananya diseminasi informasi dan komunikasi. Koordinasi dilakukan dalam perumusan dan pelaksanaan diseminasi informasi dengan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

yang telah terlaksana sebanyak 60 kali dari target kinerja 90 kali pada tahun 2020.²⁴ *Website* yang terintegrasi dengan pusat jaringan data elektronik sebanyak 48 Perangkat Daerah.

Koleksi *dataset* yang berisi data sektoral dan informasi terkait ekonomi, infrastruktur, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan, sumber daya manusia, hukum, budaya dan agama. *Dataset* ini diunggah oleh perangkat daerah dalam rangka mengintegrasikan informasi dalam satu wadah yakni *website* lampungprov.go.id guna mewujudkan KIP dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Dataset* terkait ekonomi terdapat sebanyak 71 dokumen, mengenai infrastruktur 19 dokumen, pemerintahan 18 unggahan, sumber daya manusia sejumlah 26 unggahan, dan pembangunan berkelanjutan 1 (satu) dokumen, serta hukum, budaya dan agama sebanyak 2 (dua) unggahan.

3.2 Seleksi Informasi Dalam Pengorganisasian Diseminasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Beragamnya informasi yang beredar di masyarakat diperlukan seleksi informasi agar informasi yang tabu dan belum terbukti kebenarannya dapat terpantau dan terawasi sehingga tidak ada *hoax* yang tersebar di masyarakat. Kemudahan penyebaran informasi terutama melalui elektronik memerlukan seleksi baik dalam muatan informasi yang akan diupload di *website* ataupun dengan memperhatikan kriteria informasi.

Website Pemprov Lampung memiliki konten yang memuat profil pemerintah, kebijakan dan program prioritas pemerintah, produk hukum yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Web juga memuat layanan aspirasi dan pengaduan bagi masyarakat serta tautan akun resmi media sosial pemerintah daerah dengan tampilan *website* menggunakan jenis huruf yang jelas dan menarik, sesuai untuk semua perangkat sehingga tampilan informasi dapat terbaca tanpa kendala.

Pada bulan April tahun 2020 masuk 6 (enam) permohonan informasi yang dalam pelaksanaannya hanya 4 (empat) permohonan yang dikabulkan sedangkan 2 (dua) lagi ditolak karena informasi yang diminta tidak dalam wewenang Pemprov Lampung untuk menyediakannya. Pada bulan Juli terdapat 7 (tujuh) permohonan informasi yang kesemuanya ditolak karena informasi yang diminta termasuk: informasi yang dikecualikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua permohonan informasi dapat dikabulkan sebab dalam memuat informasi perlu diperhatikan pula mengenai informasi yang dikecualikan.

Tahun 2021, total pemohon sebanyak 29 orang dengan jumlah permohonan informasi sebanyak 11. Dari total 11 permohonan informasi yang masuk, 4 (empat) permohonan ditolak dan 7 (tujuh) lainnya dikabulkan. Permohonan informasi yang ditolak karena tidak terpenuhinya syarat permohonan informasi oleh pemohon yakni adanya izin dari lembaga. Akurasi informasi yang dipilih untuk menjadi muatan dalam *website* merupakan informasi yang telah memenuhi kriteria untuk disebarluaskan kepada masyarakat agar pengguna mengakses informasi yang tepat dan akurat sehingga terhindar dari *hoax*.

²⁴ Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, "Laporan Kinerja Tahun 2020 Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Lampung" (2020).

Website ini juga menyediakan portal aplikasi-aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berjalan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung. Terdapat 21 aplikasi layanan publik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi seperti harga pasar, sistem pengaduan masyarakat, informasi kesehatan dan *Covid-19*, pajak kendaraan bermotor, dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Aplikasi tata kelola pemerintahan sendiri menjadi aplikasi yang diperuntukkan bagi aparatur pemerintahan terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dengan dibantu oleh aplikasi yang kekinian.

Tabel 3. 3
Daftar Informasi Publik Provinsi Lampung Tahun 2021

No.	Bulan	Informasi Berkala	Informasi Serta Merta	Informasi Setiap Saat
1.	Januari	-	-	-
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	13	-	2
4.	April	-	-	1
5.	Mei	13	-	7
6.	Juni	5	5	20
7.	Juli	44	18	39
8.	Agustus	3	5	10
9.	September	13	-	-
10.	Oktober	4	6	1
11.	November	-	1	-
12.	Desember	-	4	-
Jumlah		95	39	80

Sumber: Data olahan penulis, 2022

Hasil dokumentasi yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa informasi-informasi yang termuat dalam *website* memiliki kriteria informasi dalam diseminasinya. Informasi-informasi tersebut terbagi dalam informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Tahun 2021 terdapat 95 informasi berkala yang diunggah dalam *website* untuk menjadi konsumsi publik sebagai bentuk pelaporan dan penyampaian realisasi program. Informasi serta merta diunggah Pemprov dalam

menyampaikan info terkait hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi serta merta termuat dalam *website* sebanyak 39 dokumen. Informasi setiap saat wajib tersedia terkait rencana kerja program/kegiatan yang telah terunggah sebanyak 80 dokumen.

3.3 Retensi Informasi Dalam Pengorganisasian Diseminasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Informasi yang telah melewati waktu posting akan tersimpan otomatis sehingga ketika sewaktu-waktu dibutuhkan akan bisa diakses kembali di dalam *website* dengan mengetikkan kata kunci informasi. *Website* terus ditingkatkan kualitasnya dengan melihat hasil kepuasan pengguna saat mengakses *website* dan memperhatikan waktu respon yang diberikan. Hasil wawancara yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa setiap bulannya perangkat daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi bersinergi dalam menyediakan informasi terkini dan terpercaya bagi masyarakat.

Tabel 3.4
Kesatuan Informasi Dalam *Website*

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	-
2.	Februari	35
3.	Maret	61
4.	April	101
5.	Mei	121
6.	Juni	113
7.	Juli	48
8.	Agustus	54
9.	September	55
10.	Oktober	85
11.	November	76
12.	Desember	72
Jumlah		821

Sumber: Data olahan penulis, 2022

Pada Tahun 2021, sebanyak 821 data diunggah oleh perangkat daerah. Setiap perangkat daerah mengunggah informasi dalam *website* untuk kesatuan informasi pada satu wadah yang akan memudahkan saat pencarian data. Kesatuan informasi ini memberikan perlindungan dalam sistem informasi dari akses tanpa wewenang dan menghindari tuntutan akan tuduhan *hoax* dalam *website* pemerintah.

Teknik observasi penulis terhadap evaluasi diseminasi informasi *website* menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengunjung di Tahun 2021 sebanyak 10.000 pengunjung *website*. Kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan, sebanyak 80% masyarakat merasa pelayanan yang diperoleh sangat memuaskan. Hal ini menunjukkan pemberian layanan publik yang dilakukan pemerintah tergolong baik terlihat dari tingginya persentase kepuasan masyarakat. Laporan tersebut memuat persentase kepuasan yang terlihat tidak adanya ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sebanyak 10% masyarakat merasa pelayanan memuaskan dan 10% lainnya merasa pelayanan yang diperoleh cukup memuaskan.

Penilaian kepuasan masyarakat akan pemberian pelayanan sesuai permintaan jenis layanan. Penilaian akan pelayanan yang dilakukan memperoleh skor 5 yang menunjukkan kepuasan masyarakat. Skor paling rendah berada di angka 3 (tiga) yang masih menunjukkan kepuasan, yakni masuk kategori cukup.

Hasil pengamatan penulis juga menunjukkan bahwa Diskominfo telah menyediakan *website* sebagai wadah informasi Perangkat Daerah yang menyajikan informasi yang sesuai fakta dan tidak mengada-ngada dengan memperhatikan kejujuran penyajian dalam waktu postingan terkini. Informasi yang didiseminasikan dapat diandalkan kegunaan informasinya bagi pengguna. Informasi yang akurat dan lengkap dapat diakses sesuai kebutuhan dengan format informasi yang tepat akan menghasilkan keandalan informasi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengorganisasian diseminasi informasi melalui *website* memberikan dampak positif pada pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik menuju masyarakat informasi. Pengorganisasian informasi dalam diseminasi juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi yang ada guna memberikan informasi berkualitas tanpa *hoax*. Penulis menemukan temuan penting yakni pengorganisasian informasi efektif dalam meningkatkan kualitas diseminasi informasi dikarenakan adanya integrasi informasi baik dari pemerintah dan badan publik, serta adanya dukungan dari perangkat daerah dan media. Sama halnya dengan temuan Risda Wulandari, Alan Aldo Powa, Nova Yulinda dan Syaifullah bahwa diseminasi dengan menggunakan media cetak dan media *online* meningkatkan kualitas penyebaran informasi dalam mewujudkan *good governance*.²⁵²⁶²⁷²⁸ *Website* menjadi media baru dalam diseminasi yang efektif dalam mewujudkan KIP ketika diorganisasikan dengan baik.

²⁵ Wulandari, "Strategi Diseminasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Kec. Malili Kab. Luwu Timur."

²⁶ Syaifullah, "Strategi Diseminasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Penerapan Transparansi Informasi Di Kota Palopo."

²⁷ Yulinda, "Strategi Public Relations Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Good Governance."

²⁸ Powa, Kaawoan, and Pangemanan, "Pemanfaatan Teknologi Dan Informasi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian Di Kabupaten Minahasa Tenggara."

Optimalisasi layanan informasi publik pada lembaga pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan *website*, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta perbaikan infrastruktur komunikasi.²⁹³⁰³¹³² Pelayanan informasi dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan *website*, namun informasi yang akan disebarakan harus diorganisasikan dengan baik yakni dengan mengurai ambiguitas informasi agar meningkatkan kualitas informasi dan *website* sebagai media diseminasi tersebut.

Kualitas *website* pemerintah daerah berpengaruh pada efektivitas pelayanan informasi. Kualitas ini terus ditingkatkan dengan pelatihan, evaluasi rutin dan pemberian sanksi.³³ Kualitas *website* ini dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang termuat didalamnya, informasi ini harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi publik. Pengorganisasian informasi mengendalikan informasi yang beredar dengan menyediakan informasi berkualitas dan valid. *Website* memuat berbagai macam informasi penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan timbal balik pemerintah dan masyarakat dalam diseminasi.³⁴³⁵³⁶³⁷ Informasi yang telah diorganisasikan lalu didiseminasikan telah terintegrasi datanya antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dan perangkat daerah terkait.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat diseminasi informasi melalui *website* di Provinsi Lampung ini yakni statistik pengunjung *website* yang masih rendah jika dibandingkan dengan media sosial lainnya yang dimiliki Pemprov Lampung maupun dengan *Call Center*.

IV. KESIMPULAN

²⁹ Isnainiyah and Ernawati, "Optimalisasi Penggunaan Website Kabupaten Pandeglang Untuk Penyebaran Informasi Publik."

³⁰ Priyatna et al., "Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik."

³¹ Hastuti and Susilowati, "Cyber Public Relations Diskominfo Kabupaten Klaten Dalam Optimalisasi Layanan Informasi Publik."

³² Fattah, "Pemanfaatan Website Sebagai Media Penyebaran Informasi Pada Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar."

³³ Danayanti, "Pengukuran Tingkat Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Kualitas Website Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia."

³⁴ Mochamad Hanafi, "Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi DIY Melalui Efektivitas Content Website," *Jurnal Efisiensi* 17, no. 2 (2020): 156–170, <https://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi/article/view/11679/8397>.

³⁵ Polii, "Efektivitas Informasi Pelayanan Perizinan Melalui Website Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-Ptsp) Kota Manado."

³⁶ Rahman, Surya, and Kondorura, "Efektivitas Pelayanan Infomasi Melalui Website Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda."

³⁷ Handayani, "Efektivitas Website Dalam Pelayanan Elektronik Pemerintah Kota Depok."

Penulis menyimpulkan dari hasil riset yang dilakukan bahwa pengorganisasian diseminasi melalui *website* yang dilakukan oleh Diskominfo di Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik, terbukti dari penentuan informasi yang didiseminasikan dalam *website* berlandaskan pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: 800/075/V.14.02/2021 Tentang Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Pemerintah Provinsi Lampung. Penentuan informasi dalam diseminasi efektif dalam mengurai ambiguitas informasi untuk pemerataan informasi publik yang berkualitas. Seleksi informasi dalam pengorganisasian diseminasi dengan menyediakan informasi yang berkualitas agar informasi yang tabu dan belum terbukti kebenarannya dapat terpantau dan terawasi dengan memperhatikan kriteria informasi. Retensi dalam informasi dengan mengevaluasi diseminasi yang telah dilakukan yang menunjukkan kepuasan masyarakat akan pelayanan informasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada waktu pelaksanaan penelitian yang sangat singkat untuk memperoleh data pendukung.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis pun menyadari temuan dalam penelitian ini masih awalnya, diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengorganisasian informasi dalam diseminasi melalui *website* di Provinsi Lampung untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung beserta staf jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian di lingkungan Diskominfo, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Lampung. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2021*. BPS Provinsi Lampung. Vol. 2, 2021.

Danayanti, Novika. "Pengukuran Tingkat Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Kualitas Website Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia." Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. "Diskominfo Provinsi Lampung." Accessed September 3, 2021. <https://diskominfo.lampungprov.go.id/>.

———. "Laporan Kinerja Tahun 2020 Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Lampung" (2020).

Fattah, Farniwati. "Pemanfaatan Website Sebagai Media Penyebaran Informasi Pada Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar." *Ilmu Komputer Untuk Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 16–21.

<https://ilkomas.id/index.php/ilkomas/article/view/5>.

- Hanafi, Mochamad. "Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi DIY Melalui Efektivitas Content Website." *Jurnal Efisiensi* 17, no. 2 (2020): 156–170. <https://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi/article/view/11679/8397>.
- Handayani, Nida. "Efektivitas Website Dalam Pelayanan Elektronik Pemerintah Kota Depok." *Jurnal Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat* 15, no. 1 (2017): 46--57.
- Hastuti, Dewi Ayu Sri, and Eny Susilowati. "Cyber Public Relations Diskominfo Kabupaten Klaten Dalam Optimalisasi Layanan Informasi Publik." *Academic Journal of Da'wa and Communication* 01, no. 01 (2020): 41–57.
- Isnainiyah, Ika Nurlaili, and Iin Ernawati. "Optimalisasi Penggunaan Website Kabupaten Pandeglang Untuk Penyebaran Informasi Publik." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ* 4, no. 2 (2021): 141–150.
- Kharisma, Yurisdiction C. "Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah" 6, no. 3 (2018): 1087–1104.
- Peraturan Presiden. *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika*. Jakarta, 2015.
- Polii, Stevani A.P. "Efektivitas Informasi Pelayanan Perizinan Melalui Website Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-Ptsp) Kota Manado." *Jurnal Politico* 10, no. 4 (2021).
- Powa, Alan Aldo, Johannis E. Kaawoan, and Fanley N. Pangemanan. "Pemanfaatan Teknologi Dan Informasi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian Di Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–12.
- Priyatna, Centurion Chandratama, FX. Ari Agung Prastowo, Fajar Syuderajat, and Anwar Sani. "Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik." *Jurnal Kajian Komunikasi* 8, no. 1 (2020): 114.
- Rahman, Ramadhan Aunur, Iman Surya, and Daud Kondorura. "Efektivitas Pelayanan Informasi Melalui Website Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda." *Pemerintahan Integratif* 8, no. 1 (2020): 701–711.
- Republik Indonesia. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" (2018): 110.
- suara.com. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2020 Melejit, Sumut Tertinggi Di Sumatra." *Suarasumut.Id*. Last modified November 12, 2020. Accessed November 4, 2021. <https://sumut.suara.com/read/2020/11/12/222254/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2020-melejit-sumut-tertinggi-di-sumatra#:~:text=Di urutan kedua ada Sumatra Selatan dengan jumlah,bahwa pengguna internet paling besar terkonsentrasi di Jawa.>

- Syaifullah. "Strategi Diseminasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Penerapan Transparansi Informasi Di Kota Palopo." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.
- Tantri Lestari. "Daftar Pemda Peraih Innovative Government Award 2020." Last modified 2020. Accessed November 15, 2021. <https://www.tagar.id/daftar-pemda-peraih-innovative-government-award-2020>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, 2008.
- West, Richard, and Lynn H. Tunner. *Pengantar Teori Komunikasi*. 3rd ed. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Wulandari, Risda. "Strategi Diseminasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Kec. Malili Kab. Luwu Timur." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Yulinda, Nova. "Strategi Public Relations Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Good Governance." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- "Hasil Evaluasi Google Pagespeed Terhadap Kinerja Web Pemerintah." Accessed September 20, 2021. <https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/>.
- "Indeks Literasi Digital Indonesia." <http://survei.literasidigital.id/dashboard-literasi-digital>.

